

Judul : Di Paripurna DPR: Menkeu Pede Ekonomi Tahun Depan Bakal Tembus 6,1%
Tanggal : Rabu, 07 Juni 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Di Paripurna DPR

Menkeu Pede Ekonomi Tahun Depan Bakal Tembus 6,1 Persen

PEMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 sekitar 5,4 persen sampai 6,1 persen. Meski pertumbuhan akan meningkat tahun depan, ketidakpastian global masih tinggi. Sehingga harus diwaspadai.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018, di Gedung DPR, kemarin. "Ketidakpastian global harus diwaspadai meski pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat tahun depan," ujarnya.

Menurutnya, ketidakpastian ini berasal dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Di mana Presiden Donald Trump mengambil langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi dunia. Serta mengandalkan kekuatan domestik dalam mencapai sasaran ekonomi dan pembangunan nasional.

Menkeu mengatakan, angka

5,4-6,1 persen merupakan target realistis dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi saat ini, dan potensi risiko ke depan. Perbaikan perekonomian ini, akan didukung dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR).

"Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 sampai 6,1 persen harus didukung dengan reformasi kebijakan menyeluruh dan tepat sasaran. Ditambah komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target," katanya.

Adapun strategi pemerintah dengan penguatan seluruh sumber pertumbuhan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor serta belanja pemerintah yang lebih produktif dan efisien. Di mana konsumsi rumah didukung untuk mencapai 5,4 persen melalui kesempatan kerja, inflasi rendah, dan belanja sosial.

Untuk investasi, Menkeu

memproyeksi akan tumbuh 8,0 persen dengan keberlanjutan belanja infrastruktur dan peningkatan partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah, juga terus mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi di luar APBN, juga memperbaiki iklim investasi dengan penyesuaian regulasi.

Selain itu, lanjutnya, peringkat rating Indonesia menjadi Investment Grade oleh Standard & Poor's (S&P) diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.

"Dengan peningkatan investasi, maka kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru dapat diciptakan," harapnya.

Menkeu menambahkan, melalui pertumbuhan ekonomi global, pemerintah terus mendorong ekspor produk-produk manufaktur yang kompetitif, komoditas sumber daya alam yang bernilai tambah serta perluasan pasar.

Juga memanfaatkan teknologi dan efisiensi dengan bertumpu pada sektor pertanian yang makin produktif dan efisien.

"Untuk itu perbaikan produktivitas, baik dari sisi sistem logistik, infrastruktur, regulasi yang sederhana dan kualitas manusia akan menjadi fokus Pemerintah," tutur dia.

Terkait inflasi, Menkeu menerangkan, berdasarkan perkembangan historis laju inflasi, komponen inflasi yang cukup berfluktuasi adalah harga bergejolak (volatile food), termasuk di dalamnya bahan pangan pokok. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi yang menyatakan inflasi komponen harga bergejolak perlu dicermati.

"Potensi gejolak harga dapat berasal dari pergeseran pola tanam, jalur distribusi bahan pokok, dan perubahan iklim. Karenanya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi bahan pangan, melalui strategi

pengendalian harga," ujarnya.

Mengenai asumsi harga minyak mentah, Menkeu mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah acuan dunia yang diperkirakan mengalami tren peningkatan seiring perpanjangan pemangkasan produksi oleh negara penghasil minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dan non-OPEC hingga akhir triwulan I 2018.

Ketua Pansel OJK ini menyebutkan, peningkatan harga minyak mentah sangat terlihat dari realisasi rata-rata ICP April 2016 sebesar 49,6 dolar AS. Lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata ICP September 2016 yang hanya 42,2 dolar AS.

Untuk lifting, asumsi lifting minyak bumi yang diajukan pemerintah 771-815 ribu barel per hari (bph). Sementara asumsi lifting gas bumi 1,19 juta barel, setara minyak per hari (bsmph) hingga 1,23 juta bsmph. ■ MEN